

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PD. BPR BKK
PURWODADI CABANG PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SKRIPSI**



Ditulis oleh :

Nama : Muhamad Syaeful Anwar
Nomor Mahasiswa : 13311201
Jurusan : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2017

**Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang
Penawangan Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah**

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Strata-1 di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam
Indonesia

Oleh :

Nama : Muhamad Syaeful Anwar
Nomor Mahasiswa : 13311201
Jurusan : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Penulis,

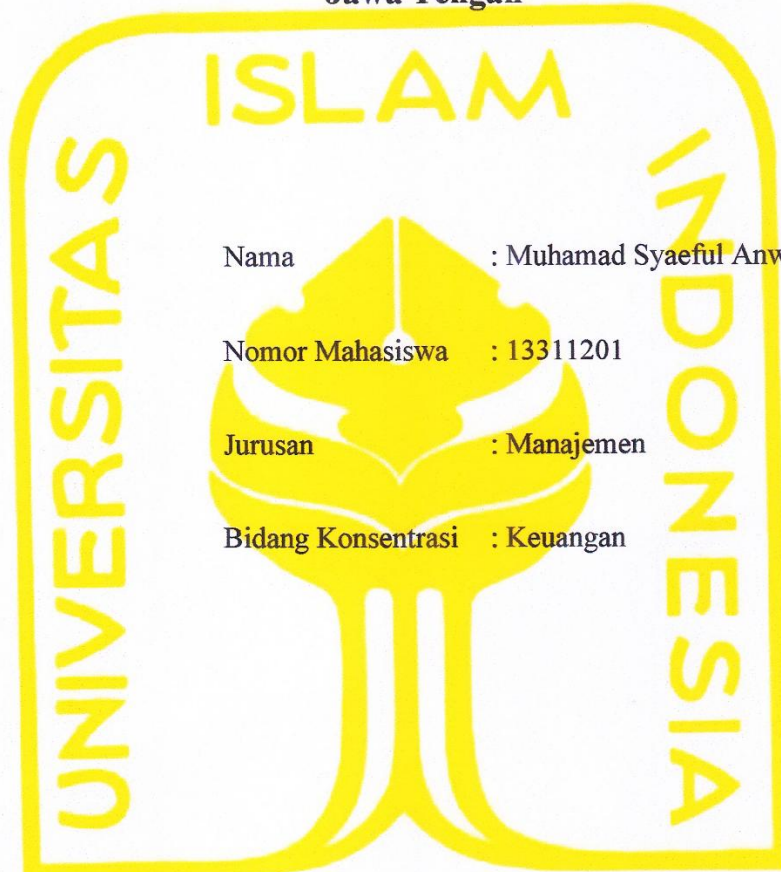


Muhamad Syaeful Anwar

Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada PD. BPR BKK

Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi

Jawa Tengah



Yogyakarta, 10 Februari 2017

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Dra. Nurfauziah, M.M.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS MANAJMEN RISIKO KREDIT PADA PD. BPR BKK PURWODADI CABANG
PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Disusun Oleh : **MUHAMAD SYAEFUL ANWAR**

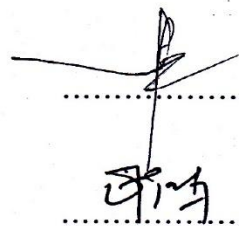
Nomor Mahasiswa : **13311201**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 13 Maret 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Nur Fauziah, Dra., MM.

Penguji : Sri Mulyati, Dra., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.”

(Q.S Al Maarij 5)

“Selalu Optimis, dunia tidak hanya selebar daun kelor, tetapi sangat luas. Cita-cita harus diusahakan sampai tercapai, tetapi dengan kesabaran.”

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu).”

(H.R. Muslim)

ABSTRAK

Analisis manajemen risiko kredit pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara melakukan seleksi, monitoring, cara penanganan kredit bermasalah, dan risiko kredit pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu seleksi kredit dengan menggunakan prinsip 5C+3R, monitoring, penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah, dan risiko kredit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara (interview).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari NPL dan kesehatan kredit yang dimiliki oleh PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan baik, karena terbukti berhasil dalam meminimalisir kredit bermasalah dan kesehatan kredit tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan BI yaitu 5%. PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sebaiknya menjaga kinerja dan meningkatkan proses pemantauan kredit, agar dapat meminimalisir risiko kredit.

Kata kunci : Analisis Manajemen Risiko Kredit, Monitoring, NPL, Tingkat Kesehatan Kredit.

ABSTRACT

Analysis of credit risk management in PD. BPR BKK Branch Penawangan Purwodadi Grobogan Central Java province. This research aims to determine how to make the selection, monitoring, handling problem loans, and credit risk in PD. BPR BKK Branch Penawangan Purwodadi Grobogan Central Java province. Methods of data analysis in this research is the selection of the loan using 5C + 3R principle, monitoring, handling and settlement of non-performing loans, and credit risk. The sample used in this research, PD. BPR BKK Branch Penawangan Purwodadi Grobogan Central Java province. Data collection techniques used were interviews (interview).

The results showed that the health of the NPL and loan owned by PD. BPR BKK Branch Penawangan Purwodadi Grobogan Central Java province declared good, because it proved successful in minimizing health problem loans and loans not exceed the maximum limit established BI is 5%. PD. BPR BKK Branch Penawangan Purwodadi Grobogan Central Java province should maintain and improve the performance of the credit monitoring process, in order to minimize credit risk.

Keywords: Analysis of Credit Risk Management, Monitoring, NPL, Health Level Credit.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan *kehadirat* Allah SWT atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan kepada setiap umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan shalawat serta salam untuk tuntunan dan suri tauladan kepada nabi Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul : “ ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PD. BPR BKK PURWODADI CABANG PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH” ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Selama dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat selesai. Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Drs. Sutrisno, M.M, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Dra. Nurfauziah, M.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala ilmu, saran, kebaikannya telah berkenan meluangkan waktu, dan

bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini, agar mendapatkan hasil yang terbaik untuk kami.

5. Pak Sahid selaku Pimpinan Cabang, Mas Budi selaku Kasi Pemasaran dan pegawai Bank PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang telah berkenan memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan selalu memberikan bantuan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orangtua penulis, Bapak Abu Haer dan Mami Sri Hastuti. Dan Dek Destya Rachmawati, kalian yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan dalam berbagai bentuk. Jika Bapak dapat mendengarkan aku, aku ingin mengatakan bahwa aku sangat merindukan kehadirannya, semoga kepergian Bapak bisa tenang dan bahagia, tapi kasih sayangmu dan semuanya yang engkau berikan tak akan pernah sirna di dalam ingatanmu dan hidupku ini. Untuk Mami terima kasih atas segalanya yang kau berikan. Dan Adik tersayang terima kasih dan minta maaf sudah membuatmu repot selama ini. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi, memberikan nasehat serta doa yang terbaik untuk penulis.
7. Dra. Siti Nursyamsiah, M.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Segenap para Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalamannya selama

kami menuntut ilmu di kampus ini. Para staf administrasi dan tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

9. Keluarga besar IESC FE UII maupun teman-teman Manajemen FE UII angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat, dan dukungan. Terima kasih atas waktu, pikiran dalam membantu penulis.
10. Teman-teman Kos Pak Gio, terima kasih atas semua pertemanan dan kebersamaannya selama ini. Dan teman *hangout* yang selalu memberikan saran, semangat dan dukungan. Terima kasih kalian telah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan ini.
11. Semua pihak yang turut membantu proses penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Kritik dan saran yang membangun, diharapkan untuk perkembangan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

Yogyakarta, 10 Februari 2017

Penulis,

Muhamad Syaeful Anwar

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi.....	v
Halaman Motto.....	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori dan Hasil Penelitian Terdahulu	7
2.1.1. Bank.....	7
2.1.2. BPR	9
2.1.3. Manajemen Risiko.....	9
2.1.4. Risiko Kredit	15
2.1.5. Penilaian Kesehatan Bank	32
2.1.6. Penelitian Terdahulu	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1. Lokasi Penelitian	39
3.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	43
3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	45
3.4. Metode Analisis Data	45
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Gambaran Umum Penelitian	51
4.2. Analisis Data.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1. Kesimpulan.....	62
Daftar Pustaka.....	65
Lampiran	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Predikat Kesehatan Bank Pada Rasio KPMM/CAR	33
Tabel 2.2. Predikat Kesehatan Bank pada rasio KAP	34
Tabel 2.3. Predikat Kesehatan Bank pada Rasio ROA	35
Tabel 2.4. Predikat Kesehatan Bank pada Rasio BOPO	36
Tabel 2.5. Predikat Kesehatan Bank pada Rasio LDR	37
Tabel 4.1. Perhitungan Rasio Keuangan pada tahun 2014-2015.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.....	42
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman pertanyaan	68
Lampiran 2. Laporan Keuangan Publikasi	70
Lampiran 3. Rasio-Rasio Keuangan dan Data Keuangan	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan / atau lembaga - lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu masalah yang dihadapi usaha kecil dalam mengembangkan usaha adalah pada aspek permodalan. Modal bagi usaha kecil merupakan kebutuhan yang sangat penting. Dalam mengembangkan usahanya, modal ini diperoleh dari kekayaan pribadi atau dari sumber-sumber lain, termasuk lembaga perbankan. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko karena peminjam tidak membayar utangnya. Risiko kredit timbul dari beberapa kemungkinan sebagai berikut: debitur tidak dapat melunasi utangnya; obligasi yang dibeli bank, tidak membayar

kupon dan/atau pokok utang; terjadi *non-performance* (gagal bayar) dari semua kewajiban antara bank dengan pihak lain.

Hanafi (2012), Risiko Kredit terjadi jika *counterparty* (pihak lain dalam transaksi bisnis kita) tidak bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Risiko kredit menjadi semakin penting karena akhir-akhir ini banyak peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan domestik, luar negeri, bahkan negara sekalipun.

Tengor, Murni dan Moniharapon (2015) menyatakan bahwa dalam penerapan manajemen risiko sudah sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia; Manajemen risiko pada PT SulutGo telah dilaksanakan dengan baik, namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan; *NPL* pada PT. Bank Sulutgo tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi secara keseluruhan.

Paramitha, Suwendra dan Yudiaatmaja (2014) menyatakan hasil penelitiannya bahwa secara simultan ada pengaruh signifikan dari risiko kredit dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan yang *go public* periode 2010-2012. Serta dalam kondisi parsial ada pengaruh negatif dan signifikan dari risiko kredit terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang *go public* periode tahun 2010-2012. Sedangkan secara parsial tidak ada pengaruh dari likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang *go public* periode tahun 2010-2012.

Putra, Topowijono dan Sudjana (2015) menyatakan hasil penelitiannya bahwa dalam mengetahui penerapan manajemen risiko kredit dan kriteria serta upaya untuk meminimalisir risiko kredit pada PT. BPR Dau Kusumadjaja Malang.

Analisis data ini menganalisis manajemen risiko kredit, persentase *NPL* sebagai kriteria dalam mengukur risiko kredit, kondisi *NPL* bank, sudah cukup baik tetapi belum efektif.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai manajemen risiko kredit. Hal yang membedakan dari penelitian ini, penulis tidak hanya membahas manajemen risiko kredit sebagai cara meminimalisir terjadinya risiko kredit saja. Melainkan penulis akan membahas sistem atau strategi dalam penanganan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* yang juga mampu untuk menimbulkan terjadinya risiko kredit dan justru akan menimbulkan dampak yang besar bagi perbankan. Peneliti juga akan mengkaji terkait dengan permasalahan terhadap para pengawas kredit atau bank yang memberikan pinjaman kredit kepada calon debitur. Dimana para pengawas kredit melakukan penyeleksian kepada calon debitur ke lapangan, untuk mengidentifikasi calon debitur dikatakan layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman kredit pada bank. Tugas bank disini harus teliti dalam mengidentifikasi calon debiturnya untuk memberikan pinjaman kredit kepada nasabah. Walaupun calon kreditur sudah melalui penyeleksian pemberian pinjaman kredit, kemudian kreditur mendapatkan pinjaman. Dan apabila memiliki permasalahan pada kreditur, saat nasabah gagal mengembalikan cicilan pinjaman kepada bank, sehingga bank harus menghadapi dampak risiko kredit.

Analisis manajemen risiko kredit kepada pengawas kreditur atau pihak bank yang harus dilakukan, karena pengawas kredit yang terjun kelapangan secara langsung untuk mengidentifikasi layak atau tidaknya para calon kreditur untuk

mendapatkan pinjaman kredit. Supaya permasalahan pengambilan keputusan kredit sesuai dengan harapan bank, maka bank harus melakukan *monitoring* debitur yang sudah diterima dan mengambil keputusan terhadap penanganan kredit yang bermasalah. Agar pihak bank harus teliti lagi dalam memberikan pinjaman kredit kepada nasabah. Sedangkan obyek penelitian ini akan memfokuskan pada Bank Perkreditan Rakyat – Badan Kredit Kecamatan Purwodadi cabang Penawangan Kabupaten daerah Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam mengamati pengaplikasian sistem 5C+3R pada perbankan dalam pemberian kredit. Dalam dunia perbankan, analisis kredit sering menggunakan kerangka 5C dan 3R. Kerangka tersebut pada intinya menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank. Kerangka tersebut bisa dipakai juga untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka latar belakang dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana PD BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah melakukan seleksi terhadap pengusulan kredit?
- 2) Bagaimana PD BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring terhadap kredit yang disalurkan?

- 3) Bagaimana cara penanganan kredit bermasalah di PD BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah?
- 4) Seberapa besar risiko kredit yang dihadapi oleh PD BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui cara melakukan seleksi terhadap pengusulan kredit PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah melakukan *monitoring* terhadap kredit yang disalurkan.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana cara penanganan kredit bermasalah di PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Untuk mengetahui seberapa besar risiko kredit yang dihadapi oleh PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian ini bagi Akademisi diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan informasi tentang perkembangan pengelolaan, monitoring dan penyelesaian dalam risiko kredit yang terjadi pada Bank. Sehingga ilmu dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya.

Sedangkan hasil penelitian ini bagi Praktisi diharapkan dapat digunakan sebagai pengajuan kredit dan mempertimbangkan risikonya. Sehingga mendapatkan manfaat bagi praktisi seperti calon nasabah, nasabah, dan manajer bank.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Hasil Penelitian Terdahulu

2.1.1. Bank

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Pada pengertian bank sebagai lembaga atau badan usaha. Sedangkan pengertian perbankan sangat dinamis. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam perspektif ilmu keuangan, perbankan adalah bagian dari ilmu keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

(1) Peran bank

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Pengelola bank dalam melakukan kegiatannya juga selalu dituntut senantiasa menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang cukup sesuai dengan penanamannya.

(2) Fungsi bank

Bank mempunyai fungsi yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 3 tentang perbankan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.2. BPR

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa definisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu jenis bank yang memberikan jasa intermediasi keuangan terutama kepada usaha mikro dan kecil serta masyarakat di pedesaan, senantiasa menghadapi Risiko dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasinya sangat terbatas di wilayah tertentu misalnya kabupaten saja. BPR tidak dibolehkan mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral. Dengan demikian penghimpunan dana hanya boleh dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito. Pelaksanaan kegiatan BPR ada yang berbasis bunga dan berbasis syariah.

2.1.3. Manajemen Risiko

Risiko ada dimana-mana, bisa datang kapan saja dan sulit dihindari. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka

organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Dalam beberapa situasi, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut. Karena itu risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan atau barangkali mengoptimalkan risiko. Perusahaan seringkali secara sengaja mengambil risiko tertentu, karena melihat potensi keuntungan dibalik risiko tersebut. (Hanafi,2012)

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi,mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi untuk kepentingan proses pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali dan aman.

Secara umum manajemen risiko merupakan serangkaian proses yang diawali dengan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan *controlling* terhadap risiko-risiko portofolio. Dengan demikian pengelola bank dapat selalu memantau agar risiko tidak mempengaruhi tingkat likuiditas bank itu sendiri. Sebagai peran *intermediary*, bank selalu dihadapkan pada risiko-risiko bisnis. Risiko bisnis yang dihadapi mencakup diantaranya

risiko kredit,risiko pasar,risiko likuiditas, risiko operasional,risiko legal. (Qur'ani,2013)

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengelola risiko. Empat langkah dalam proses manajemen risiko meliputi:

1. Identitas Risiko (*Identify Risk*)

Banyak potensi risiko yang menghadang perusahaan-perusahaan yang mencari laba, demikian juga dengan organisasi nirlaba, maupun orang per orang. Oleh karena itu langkah pertama dalam proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi bahaya atau ancaman risiko yang relevan.

2. Evaluasi Risiko

Langkah kedua adalah perlu dilakukan evaluasi untuk setiap sumber risiko yang telah teridentifikasi. Pada tahap ini, risiko murni dapat dikategorikan berdasarkan frekuensi atau berdasarkan seringnya kerugian terjadi. Selain itu perlu juga dianalisis besarnya atau tingkat kekejaman risiko. Harus dipertimbangkan besarnya kerugian paling mungkin terjadi dan kerugian maksimum yang mungkin terjadi.

3. Memilih Teknik Manajemen Risiko

Hasil analisis pada langkah dua adalah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan cara-cara yang akan

digunakan menangani risiko. Untuk situasi tertentu mungkin tidak perlu tindakan lebih lanjut.

4. Implementasi dan Kaji Ulang Keputusan Manajemen Risiko

Langkah berikut adalah keputusan tentang metode optimal untuk menangani risiko yang telah diidentifikasi, organisasi atau seseorang harus mengimplementasikan metode yang dipilih. Akan tetapi, manajemen risiko harus merupakan proses yang terus menerus dimana keputusan-keputusan terdahulu, yang telah diputuskan, harus dikaji ulang secara teratur. (Siahaan, 2009)

1) Risiko-Risiko Bank

Menurut Peraturan PBI No. 11/25/PBI/2009 dan perubahan PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum bahwa tujuan pengaturan ini adalah untuk mengendalikan risiko yang dihadapi bank sehingga kualitas penerapan manajemen risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan Bank tetapi juga bagi kepentingan bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian risiko adalah transparansi informasi terkait produk atau aktivitas bank. Selain itu peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko diharapkan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Walaupun penerapan manajemen risiko bagi bank mengadopsi Basel II namun terdapat perbedaan mengenai definisi tersebut. Adapun jenis risiko yang wajib dikelola bank adalah:

(A) Risiko kredit

Memenuhi kewajiban (PBI) atau Risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *Counterparty* akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo (Basel II).

(B) Risiko Pasar

Risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar serta termasuk perubahan harga option. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

(C) Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsi proses internal,

kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko Operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

(D) Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi:

1. Risiko Likuiditas Pasar merupakan risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *Off-setting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (*market disruption*).
2. Risiko Likuiditas Pendanaan merupakan risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

(E) Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain

disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

(F) Risiko Strategik

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

(G) Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan KPMM, KAP, PPAP, BMPK Risiko Pasar terkait dengan posisi devisa neto (PDN), Risiko Strategik terkait dengan ketentuan tertentu.

2.1.4. Risiko Kredit

Risiko Kredit terjadi jika *counterparty* (pihak lain dalam transaksi bisnis kita) tidak bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Risiko kredit menjadi semakin penting karena

akhir-akhir ini banyak peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan domestik, luar negeri, bahkan negara sekalipun. (Hanafi,2012)

Credit Risk, yang sangat mendasar dari semua *product market risk* suatu bank, karena risiko ini merupakan erosi nilai, yang disebabkan oleh terjadinya wanprestasi atau *non-payment* dari debitur. Jadi, debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga dan utang pokok/angsuran utang pokok kreditnya atau tidak memperlihatkan tanda-tanda mampu membayar karena gagal usaha. (Tjoekam,1999)

Penerapan manajemen risiko kredit ini dimaksudkan untuk menilai risiko kredit yang melekat pada pelaksanaan pemberian kredit. Hal yang penting didalam penerapan manajemen risiko kredit sehingga kegiatan usaha bank, dalam hal ini kredit dapat terkendali pada batas yang dapat diterima. (Mulyani,2012)

Manajemen Risiko Kredit merupakan sarana pencegahan bagi timbulnya risiko berlebihan pada bank. Semakin cermat dan akurat pelaksanaan manajemen risiko kredit, semakin kecil pula risikonya.

Putra, Topowijono dan Sudjana (2015), “penerapan manajemen risiko kredit pada PT. BPR Dau Kusumadjaja Malang, meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit. Risiko kredit yang muncul adalah risiko kredit

bermasalah. Faktor penyebab yang perlu mendapat perhatian khusus adalah dari pihak debitur. Pengukuran risiko kredit dengan menggunakan metode *NPL*”.

(1) Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan syarat-syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh bank. Adapun penyajian konteksnya dalam bentuk urutan langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank, yaitu tahap-tahap permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit.

(A) Mekanisme Seleksi Kredit

Kredit merupakan hal terpenting dari fungsi bank dan merupakan risiko yang paling besar yang dihadapi bank jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kredit. Oleh karena itu diperlukan sebuah mekanisme untuk mengatur dan mengendalikan kredit tersebut dimana mekanisme yang digunakan teratur dan diakui sebagai cara yang bisa digunakan sebagai pegangan dalam memberikan kredit.

Berdasarkan permohonan kredit dan data pendukung petugas bank/Lembaga Keuangan melakukan analisis kelayakan kredit atas kelayakan untuk calon debitur menggunakan kriteria 5C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*. (Hanafi, 2012) dalam bukunya yaitu Manajemen Risiko menyebutkan ada 5C dijadikan pedoman dalam pemberian kredit, dijelaskan sebagai berikut:

A) Pedoman 5C

Dalam dunia perbankan, analisis kredit digunakan untuk menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank.

Pedoman 5C berkaitan dengan karakteristik:

1. *Character*

Menunjukkan kemauan peminjam (debitur) untuk memenuhi kewajibannya. Kemauan tersebut lebih berkaitan dengan sifat dan watak peminjam. Seorang yang mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman, tetapi tidak mau mengembalikan, akan mempunyai character yang tidak mendukung pemberian kredit. Pemberian pinjaman akan dan harus

memperhatikan karakteristik ini dengan seksama.

2. *Capacity*

Kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban utangnya, melalui pengelolaan perusahaannya dengan efektif dan efisien. Jika peminjam bisa mengelola perusahaannya dengan baik, perusahaan bisa memperoleh keuntungan, maka kemungkinan bisa mengembalikan pinjaman akan semakin tinggi. *Capacity* bisa dilihat melalui masa lalu (prestasi masa lalu atau *track of record* masa lalu).

3. *Capital*

Posisi keuangan perusahaan (peminjam) secara keseluruhan. Kondisi keuangan bisa dilihat melalui analisis keuangan, seperti analisis rasio. Dalam hal ini, bank atau lembaga keuangan harus memperhatikan komposisi utang dengan modal sendiri. Jika utang terlalu besar, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan juga akan semakin besar, dan sebaliknya.

4. *Collateral*

Aset yang dijaminkan (dijadikan agunan) untuk suatu pinjaman. Jika karena sesuatu hal pinjaman tidak bisa dikembalikan, jaminan bisa dijual untuk menutup pinjaman tersebut. Lembaga keuangan bisa meminta jaminan yang nilainya melebihi jumlah pinjaman.

5. *Condition*

Sejauh mana kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan mengembalikan pinjaman. Jika kondisi perekonomian memburuk, maka kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan semakin tinggi, yang membuat kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan melunasi pinjaman, juga semakin tinggi.

B) Pedoman 3R bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. *Return*

Return berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta, apakah kredit tersebut bisa menghasilkan *return* (pendapatan) yang

memadai untuk melunasi utang dan bunganya.

2. *Repayment capacity*

Repayment capacity berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo.

3. *Risk-bearing ability*

Risk-bearing ability berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut. Jaminan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh kreditur dalam kaitannya dengan *Risk-bearing ability*.

(B) Mekanisme *Monitoring*

Istilah ini selalu ada dalam setiap kegiatan, terutama kegiatan yang terkait dengan perbankan, dalam hubungannya dengan kegiatan usaha debiturnya. Sebagaimana dimaklumi, usaha bank mengandung risiko, dan tidak ada kemungkinan menghilangkan risiko ini, tetapi yang bisa dilakukan adalah meminimalkan risiko.

Apabila suatu debitur mendapat pinjaman dari bank untuk kegiatan usahanya, maka dalam *loan agreement* selalu dipersyaratkan adanya monitoring. *Monitoring* diperlakukan untuk bisa memantau kinerja usaha debitur, karena hal ini dipersyaratkan dalam aturan Bank Indonesia (PBI 7 tahun 2005). Dengan melakukan *monitoring*, maka bank dapat segera melakukan langkah-langkah penyelamatan apabila kinerja usaha debitur menunjukkan penurunan. Apabila debitur mengalami penurunan usaha, maka bank dan debitur wajib berusaha memperbaiki kondisi tersebut, agar debitur tetap dapat menjalankan usahanya dan bank dapat meminimalkan risikonya. Perbaiki kondisi ini lazim disebut dengan restrukturisasi (Edratna, 2006).

Strategi restrukturisasi digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang tidak berkembang, sakit, atau adanya ancaman bagi organisasi, atau industri berada diambang pintu perubahan yang signifikan. Pemilik umumnya melakukan perubahan dalam tim unit manajemen, perubahan strategi, atau masuknya teknologi baru dalam perusahaan. Selanjutnya sering diikuti dengan akuisisi untuk membangun bagian yang kritis, menjual bagian yang tidak perlu, guna mengurangi biaya akuisisi

secara efektif. Hasilnya adalah perusahaan yang kuat, atau merupakan transformasi industri.

Untuk memudahkan monitoring, perlu dibuat aturan secara tertulis, serta dipahami oleh pihak-pihak yang membuat kesepakatan. Dalam kegiatan restrukturisasi pinjaman, apabila telah tercapai kesepakatan antara Bank dan debitur, agar restrukturisasi berjalan lancar, perlu dipahami oleh kedua belah pihak pentingnya unsur *monitoring*.

Mengapa hal ini diperlukan? Restrukturisasi akan dapat berjalan lancar jika dilakukan *monitoring cash flow* dibuat berdasarkan asumsi, sehingga pada implementasi dilapangan, ada kemungkinan pelaksanaannya berbeda dengan asumsi yang dibuat, atau ada hal-hal yang tak dapat dihindari dilapangan yang menyebabkan target sesuai *cash flow* tidak tercapai. Oleh karena itu bank perlu melakukan pemantauan kinerja usaha debitur dari waktu ke waktu berdasarkan laporan keuangan dan kunjungan *on the spot*. Apabila *monitoring cash flow* dapat berjalan baik, selain adanya kepastian pembayaran kewajiban, juga akan memudahkan debitur dalam menyusun laporan keuangan setiap bulan.

Beberapa persyaratan dan langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan *monitoring cash flow*, antara lain sebagai berikut :

- a) Seluruh penerimaan, baik dari kegiatan operasional maupun *non operational* harus ditampung dalam *escrow account* (pengeluarannya atas persetujuan bank).
- b) Untuk memastikan tersedianya dana guna membayar kewajiban Bank yang akan jatuh tempo pada akhir bulan (bunga, angsuran pokok dsb-nya) maka Bank dapat menetapkan *sweeping date* (beberapa hari kerja sebelum akhir bulan) untuk memindah bukukan sejumlah dana ke rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban.
- c) Debitur menyiapkan budget bulanan atau tiga bulanan yang mengacu pada proyeksi *cash flow*, yang telah disampaikan kepada Bank.
- d) Bank mengevaluasi setiap usulan budget yang disampaikan kepada debitur. Hal yang perlu dievaluasi adalah apakah asumsi yang dipakai itu logis, dan rencana pengeluaran telah menggunakan prinsip efisiensi. *Budget* yang telah disetujui bank menjadi dasar bagi debitur untuk mengeluarkan dana dari *escrow account* tersebut.

- e) Membandingkan realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan *budget* yang telah disetujui. Hasil analisis ini dapat dipergunakan untuk mengkaji usulan *budget* periode berikutnya.
- f) Apabila debitur akan mengajukan rencana pengeluaran diluar *budget*, maka debitur dapat mengajukan revisi *budget*. (Edratna, 2006).

Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa dalam memonitoring calon debitur yang akan diberikan kredit maka bank harus melakukan beberapa hal berikut, salah satunya *on the spot*, yaitu bank harus melakukan survei atau obervasi secara langsung ketempat nasabah untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan nasabah dalam hal mengembalikan pinjaman tersebut. Kelayakannya dilihat dari tempat kerjanya, bentuk usahanya, izin usahanya, *stock* barang ada atau tidak, objek penjualannya, jaminannya dan sebagainya.

(2) Pengukuran Risiko Kredit

Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar/kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko, risiko yang mana yang paling relevan.

Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya.

Dimensi yang harus diukur:

1. Frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi.,
2. Keparahan dari kerugian itu.

Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut paling tidak diketahui:

1. Nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran.
2. Variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain naik-turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu.
3. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri (diretensi), jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dimensi pengukuran tersebut, antara lain:

1. Orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting dari pada frekuensinya.

2. Dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial seorang Manajer Risiko harus secara cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan.
 3. Dalam pengukuran kerugian Manajer Risiko juga harus memperhatikan orang, harta kekayaan atau *exposures* yang lain, yang tidak terkena peril.
 4. Kadang-kadang akibat akhir dari peril terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah dari pada yang diperhitungkan, antara lain akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung.
 5. Dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian, di samping nilai rupiahnya.
- (Novianti,2014)

(3) Penanganan Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit yang bermasalah, maupun tidak

bermasalah tersebut dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. (Ismail,2010).

1. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Tengor, Murni dan Moniharapon (2015), dalam penelitian untuk menentukan metode penyelesaian terhadap timbulnya kredit bermasalah. Metode tersebut adalah:

a. Rescheduling

Perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran, dan atau perpanjangan jangka waktu, termasuk ketentuan masa tenggang waktu (*grace period*), baik yang meliputi besarnya angsuran maupun tidak.

b. Reconditioning

Bentuk *reconditioning* yang diterapkan adalah:

1. Pengurangan tingkat suku bunga kredit, penurunan tingkat suku bunga dapat diberikan kepada debitur atas dasar pertimbangan kemampuan bayar (*RPC*) dan dapat diberikan tingkat suku bunga terendah pada strata palfon kredit sebelumnya.

2. Pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan bunga dapat diberikan kepada debitur yang masih memiliki tunggakan bunga sebelum kredit direstrukturisasi. Besarnya pengurangan tunggakan dapat diberikan maksimal sebesar tunggakan bunga yang ada tetapi tetap harus memperhitungkan risiko kerugian yang paling minimum.

c. Restructuring

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain:

1. Bank dapat memberikan tambahan kredit

Penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. Bank akan menghitung kembali

berapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

2. Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur

Bank meminta kepada nasabah untuk menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur.

3. Kombinasi antara bank dan nasabah

Bank akan menghitung kembali total dana yang dibutuhkan oleh debitur kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencari pemodal baru atau dari pemilik modal lama. Kombinasi ini, merupakan cara yang terbaik, karena bank menilai bahwa debitur serius untuk menyelesaikan kreditnya, dengan ikut serta menambah modal.

d. Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:

1. *Rescheduling dan Restructuring*

Upaya gabungan antara *rescheduling* dilakukan misalnya, bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.

2. *Rescheduling dan Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

3. *Restructuring dan Reconditioning*

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

4. *Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning*

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank misalnya

jangka waktu diperpanjang kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

e. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangan. (Ismail,2010)

Penyelesaian kredit merupakan tahap dipenuhinya semua kewajiban hutang nasabah terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit. Dalam tahap ini perhitungan semua kewajiban utang nasabah harus sudah diselesaikan sampai dengan tanggal pelunasan, yaitu: utang pokok, utang bunga, denda-denda (apabila ada) dan biaya administrasi lainnya.

2.1.5. Penilaian Kesehatan Bank

Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, dimana untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif dan prudent di dunia perbankan Indonesia. Dan peraturan pemerintah yang ditetapkan

oleh bank Indonesia di atas mengenai alat ukur penilaian tingkat kesehatan perbankan mencakup penilaian faktor CAMEL, atau lebih dikenal dengan analisis CAMEL, yakni :

1. Aspek permodalan (Capital)

Penilaian pertama adalah aspek permodalan suatu bank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang di dasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut di dasarkan pada Capital Adequacy Ratio (CAR) yang ditetapkan oleh BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Ketentuan pencapaian CAR yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan waktu, sehingga pemerintah memberikan sesuai dengan ketentuan. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, target CAR tidak tercapai, maka bank yang bersangkutan dikenai sanksi.

Tabel 2.1. Predikat Kesehatan Bank Pada Rasio KPMM/CAR

No	Rasio	Predikat
1.	$KPMM > 15\%$	Sangat Sehat
2.	$9\% < KPMM \leq 15\%$	Sehat
3.	$8\% < KPMM \leq 9\%$	Cukup Sehat
4.	$KPMM \leq 8\%$	Kurang Sehat
5.	$KPMM \leq 8\%$	Tidak Sehat

(sumber: PBI nomor 17/11/PBI/2015)

2. Aspek aset (Assets)

Aspek yang kedua adalah mengukur kualitas aset bank. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset

yang dimiliki bank. Penilaian aset oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio dapat dilihat dari neraca yang dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

Tabel 2.2. Predikat Kesehatan Bank pada rasio KAP

No	Rasio	Predikat
1.	$KAP \leq 10\%$	Sangat Sehat
2.	$10\% < KAP \leq 10.35\%$	Sehat
3.	$10.35\% < KAP \leq 12.60\%$	Cukup Sehat
4.	$12.60\% \leq KAP < 14.85\%$	Kurang Sehat
5.	$14.85\% \leq KAP < 22.50\%$	Tidak Sehat

(sumber: PBI nomor 17/11/PBI/2015)

3. Aspek Kualitas Manajemen (Management)

Aspek yang ketiga meliputi penilaian kualitas manajemen bank. Untuk melihat kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman para karyawan dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas.

4. Aspek Earning

Merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan

dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. Penilaian ini meliputi:

a. Rasio Laba terhadap Total Aset (ROA)

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio Profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.

Tabel 2.3. Predikat Kesehatan Bank pada Rasio ROA

No	Rasio	Predikat
1.	$ROA \geq 2\%$	Sangat Sehat
2.	$1.26\% < ROA \leq 2\%$	Sehat
3.	$0.51\% < ROA \leq 1.25\%$	Cukup Sehat
4.	$0\% < ROA \leq 0.5\%$	Kurang Sehat
5.	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

(sumber: PBI nomor 17/11/PBI/2015)

b. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), yaitu perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Tabel 2.4. Predikat Kesehatan Bank pada Rasio BOPO

No	Rasio	Predikat
1.	$BOPO \leq 94\%$	Sangat Sehat
2.	$94\% < BOPO \leq 95\%$	Sehat
3.	$95\% < BOPO \leq 96\%$	Cukup Sehat
4.	$96\% < BOPO \leq 97\%$	Kurang Sehat
5.	$BOPO \geq 97\%$	Tidak Sehat

(sumber: PBI nomor 17/11/PBI/2015)

5. Aspek Likuiditas

Aspek kelima penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud hutang-hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian dalam aspek ini meliputi :

- a. Rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar
- b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank KLBI, giro, tabungan, deposito dan lain-lain.

Untuk menilai apakah suatu bank mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera ditagih (berjangka pendek) maka digunakan metode Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR yaitu rasio antara jumlah seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga bank.

Tabel 2.5. Predikat Kesehatan Bank pada Rasio LDR

No	Rasio	Predikat
1.	$50\% < \text{LDR} \leq 75\%$	Sangat Sehat
2.	$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$	Sehat
3.	$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$	Cukup Sehat
4.	$100\% < \text{LDR} \leq 120\%$	Kurang Sehat
5.	$\text{LDR} > 120\%$	Tidak Sehat

(sumber: PBI nomor 17/11/PBI/2015)

Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan tersebut dilakukan dengan mengkuantifikasikan komponen dari masing-masing faktor. Selanjutnya, faktor dan komponen diberikan bobot sesuai dengan pengaruh terhadap kesehatan bank. Penilaian faktor dari komponen dilakukan dengan sistem kredit (reward system) yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai 100. Berdasarkan hasil penilaian atas dasar bobot, kemudian ditetapkan 4 predikat tingkat kesehatan bank yaitu :

- a. Sehat, jika nilai kredit 81 sampai 100
- b. Cukup sehat, jika nilai kredit 66 sampai dengan kurang 81
- c. Kurang sehat, jika nilai kredit 51 sampai dengan kurang 66
- d. Tidak sehat, jika nilai kredit 0 sampai dengan kurang 51

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Tengor, Murni dan Moniharapon (2015) menyatakan bahwa dalam penerapan manajemen risiko sudah sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia; Manajemen risiko pada PT SulutGo telah dilaksanakan dengan baik, namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan; *NPL* pada

PT. Bank Sulutgo tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi secara keseluruhan.

Paramitha, Suwendra dan Yudiaatmaja (2014) menyatakan hasil penelitiannya bahwa secara simultan ada pengaruh signifikan dari risiko kredit dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan yang *go public* periode 2010-2012. Serta dalam kondisi parsial ada pengaruh negatif dan signifikan dari risiko kredit terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang *go public* periode tahun 2010-2012. Sedangkan secara parsial tidak ada pengaruh dari likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang *go public* periode tahun 2010-2012.

Putra, Topowijono dan Sudjana (2015) menyatakan hasil penelitiannya bahwa dalam mengetahui penerapan manajemen risiko kredit dan kriteria serta upaya untuk meminimalisir risiko kredit pada PT. BPR Dau Kusumadjaja Malang. Analisis data ini menganalisis manajemen risiko kredit, persentase *NPL* sebagai kriteria dalam mengukur risiko kredit, kondisi *NPL* bank, sudah cukup baik tetapi belum efektif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Obyek dari penelitian ini dilakukan pada Kantor Cabang PD BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan Raya Penawangan No. 85 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Sampel yang diambil yaitu kepada pihak bank atau Manajer Kredit.

3.1.1. Tinjauan Umum PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan

(1) Sejarah Singkat PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

PD. BPR BKK Purwodadi sebelum menjadi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah merupakan lembaga keuangan non Bank yang bernama Badan Kredit Kecamatan (BKK), yang berdiri pada tahun 1970 dimana kondisi perekonomian pada saat itu dapat dikatakan memprihatinkan, dan masyarakat pada umumnya kekurangan modal untuk kegiatan usahanya. Sementara itu lembaga-lembaga keuangan yang ada pada umumnya

berlokasi di kota-kota yang jauh dari jangkauan pendudukan yang sebagian besar berdomisili di pedesaan. Pada tanggal 8 Oktober 1991, Badan Kredit Kecamatan Purwodadi mendapat persetujuan Menteri Keuangan KEP-346/KM.13/1991 sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan tujuan untuk mendekatkan pemodalannya kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Grobogan dan sebagai Penyumbang Pendapat Asli Daerah (PAD).

Dalam menjalankan usahanya PD. BPR BKK yang ada di Kabupaten Grobogan sebanyak 18 BKK, merupakan unit yang terpisah satu dengan yang lain sehingga persaingan antar BKK kerap terjadi di dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Dengan pertimbangan tersebut PD. BPR BKK yang ada di Kabupaten Grobogan melakukan penggabungan usaha atau merger.

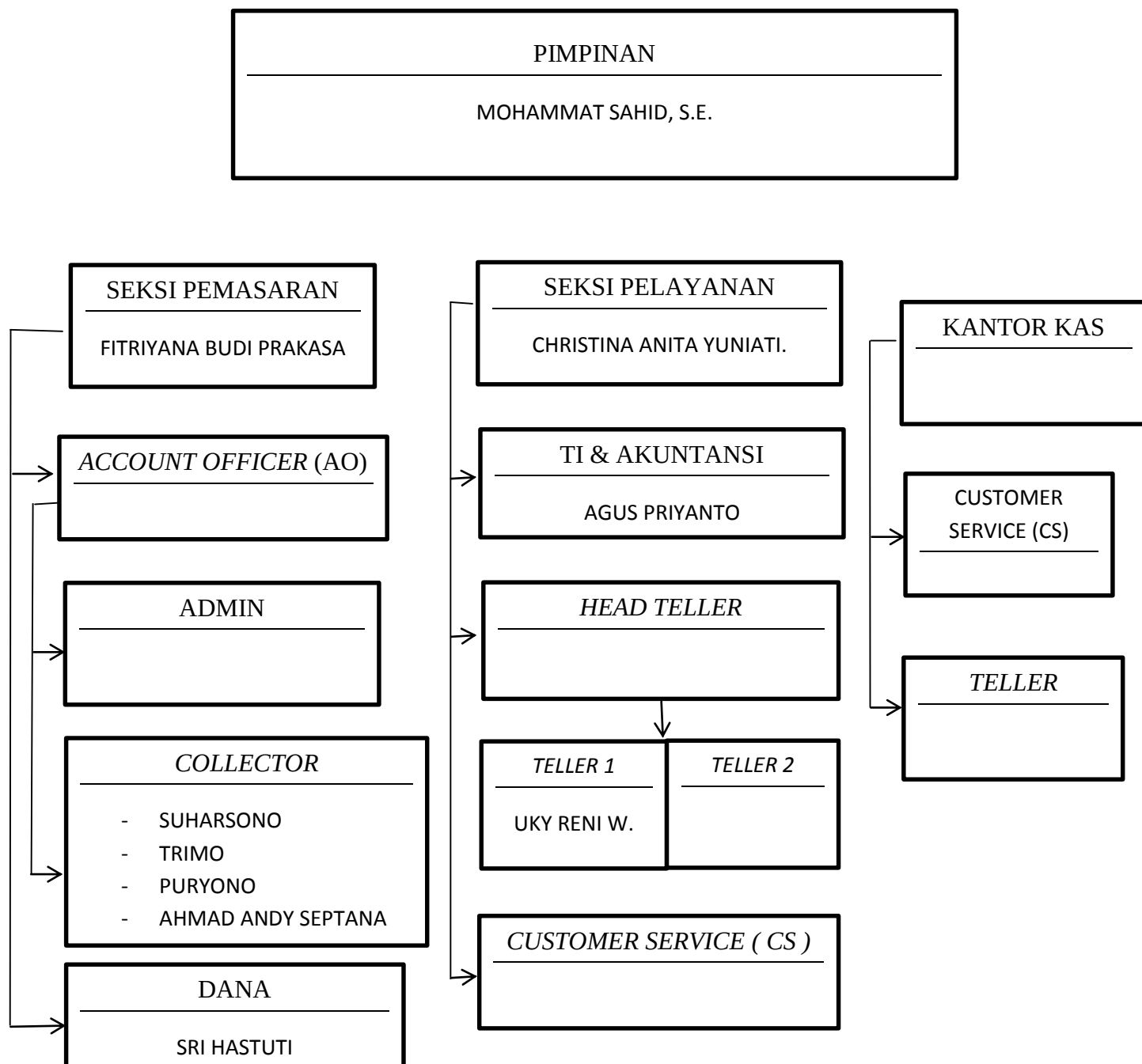
Pada tanggal 21 Oktober 2005, sesuai dengan keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia nomor 7/7/KEP.DP G/2005 tentang izin penggabungan usaha serta keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 503/68/2005 tentang persetujuan izin penggabungan usaha, sebanyak 18 PD. BPR BKK se-Kabupaten Grobogan yaitu: PD. BPR BKK Toroh, PD. BPR BKK Wirosari, PD. BPR BKK Geyer, PD. BPR BKK Tawangharjo, PD. BPR BKK Ngaringan, PD. BPR BKK Kradenan, PD. BPR BKK

Gabus, PD. BPR BKK Gabus, PD. BPR BKK Pulokulon, PD. BPR BKK Grobogan, PD. BPR BKK Klambu, PD. BPR BKK Brati, PD. BPR BKK Godong, PD. BPR BKK Penawangan, PD. BPR BKK Karangrayung, PD. BPR BKK Gubug, PD. BPR BKK Kedungjati dan PD. BPR BKK Tegowanu melakukan penggabungan (merger) ke PD. BPR BKK Purwodadi.

(2) Struktur Organisasi PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Struktur organisasi adalah alat bantu untuk mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki setiap divisi. Yang juga akan mempermudah dalam mencapai tujuan dari setiap perusahaan. Struktur organisasi PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PD. BPR BKK PURWODADI CABANG
PENAWANFAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH



Gambar 3.1. Struktur Organisasi PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan

Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

3.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Definisi operasional variabel dapat di jelaskan sebagai berikut :

- 1.) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
- 2.) *Return on Assets* (ROA)
- 3.) *Non Performing Loan* (NPL)

Variabel – variabel tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kredit suatu Bank yaitu dengan cara :

- 1) CAR

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang ditetapkan oleh BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Ketentuan pencapaian CAR yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan waktu, sehingga pemerintah memberikan sesuai dengan ketentuan. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, target CAR tidak tercapai, maka bank yang bersangkutan dikenai sanksi. Rasio *capital* yang dipakai untuk metode CAMEL adalah CAR resiko pembiayaan dan pasar. Dalam penelitian ini, kecukupan modal dinilai dengan CAR :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)}} \times 100\%$$

2) ROA

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio Profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return on assets* (ROA), merupakan rasio penunjang:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – Rata Total Aset}} \times 100\%$$

3) *Non Performing Loan* (NPL)

Menurut Tengor,dkk (2015) *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur kredit bermasalah/ *Non Performing Loan* (NPL). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, salah satu risiko yang menjadi sumber penilaian kesehatan suatu bank harus mempunyai *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet harus dibawah 5% angka ini menunjukkan berapa persen kredit yang bermasalah dari keseluruhan kredit yang dikururkan bank ke masyarakat. Rumus untuk menentukan rasio NPL adalah:

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a.) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objeknya. Data Primer diperoleh dari pengamatan, pencatatan, pengumpulan data dan hasil wawancara secara langsung dengan proses tanya jawab yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis kepada pihak manajer kredit dan staff kredit.

b.) Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data Sekunder diperoleh dari data historis PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, laporan penelitian dan literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh peneliti. Jenis data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan publikasi PD BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

3.4. Metode Analisis Data

Peneliti akan menjelaskan mengenai metode analisis data manajemen risiko kredit. Metode analisis data dalam manajemen risiko kredit meliputi:

1. Seleksi Terhadap Pengusulan Kredit

Langkah-langkah PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Melakukan seleksi terhadap debitur :

- a. Identitas pemohon, Antara lain : nama pemohon, bentuk usaha, jenis usaha, susunan pengurus, legalitas usaha, dan sebagainya.
- b. Tujuan permohonan kredit, mencakup: jumlah kredit, obyek yang dibiayai, jangka waktu kredit dan alasan kebutuhan kredit.
- c. Riwayat hubungan bisnis dengan bank, mencakup: saat mulai, bidang hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan bisnis dan jumlah total nilai hubungan bisnis.
- d. Analisis 5C kredit, mencakup analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi dan analisis agunan kredit.

A. Analisis watak (*character*)

B. Analisis kemampuan (*capacity*)

C. Analisis modal (*capital*)

D. Analisis agunan (*collateral*)

E. Analisis kondisi (*condition*)

2. Monitoring Terhadap Kredit Yang Disalurkan

Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya. Pengawasan kredit dapat dilakukan oleh pejabat kredit atau atasan dari pejabat tersebut dengan cara pengawasan ganda dan pengawasan melekat, maupun pemeriksaan oleh kantor inspeksi atau pihak ekstern (Bank Indonesia). Pengawasan ganda merupakan pengawasan yang dilakukan oleh dua orang pejabat yang berbeda fungsi terhadap tahapan pemberian kredit dengan maksud untuk mengantisipasi kerawanan terhadap penyalahgunaan. Sedangkan pengawasan melekat merupakan kegiatan pengendalian secara terus-menerus yang dilakukan oleh atasan langsung.

Obyek pengawasan kredit mencakup semua pejabat bank yang terkait dengan bidang perkreditan dan semua jenis fasilitas kredit yang diberikan termasuk kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank. Kemudian pengawasan kredit dilakukan secara berkesinambungan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan atau penyelesaian kredit, baik berdasarkan laporan yang disampaikan secara berkala dan atau informasi lain yang relevan maupun peninjauan secara langsung atas seluruh kegiatan debitur. (Kuncoro dan Suhardjono, 2011)

3. Cara Penanganan Kredit Bermasalah

Langkah-langkah penanganan kredit bermasalah untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL) sehingga meminimalisir risiko kredit agar dapat meningkatkan tingkat kesehatan bank, sebagai berikut:

- A.) Penyelamatan kredit bermasalah meliputi: rescheduling, reconditioning dan restructuring.
- B.) Penyelesaian kredit bermasalah meliputi: hapus buku, pengambilalihan agunan dan hapus tagih. (putra, dkk, 2015)

4. Besarnya Risiko Kredit

Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar/kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko, risiko yang mana yang paling relevan.

Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya.

Dimensi yang harus diukur:

1. Frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi.,

2. Keparahan dari kerugian itu.

Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut paling tidak diketahui:

1. Nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran.
2. Variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain naik-turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu.
3. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri (diretensi), jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. (Novianti,2014)

Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional. Dan peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh bank Indonesia di atas mengenai Non Performing Loan Total Kredit untuk perhitungan rasio NPL Total Kredit diperoleh dari daftar rincian kredit yang diberikan dalam laporan bulanan Bank Umum, dan laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola *executing* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro,kecil, dan menengah.

Klasifikasi kredit bisa dijelaskan sebagai berikut:

- I. Lancar (Pass)
- II. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)
- III. Kurang Lancar (Substandard)
- IV. Diragukan (Doubtfull)
- V. Macet (Loss)

Dari klasifikasi diatas, kredit yang mulai bermasalah dikategorikan ke dalam klasifikasi nomor III, IV dan V. Dimana pengembalian pinjaman dari debitur sudah mulai mengalami macet. Jika debitur sudah mulai menunjukkan perilaku seperti nomor III, IV dan V maka diperlukan tindakan untuk menyelamatkan. Tindakan-tindakan yang bisa diambil Antara lain:

- Penurunan suku bunga kredit.
- Perpanjang jangka waktu kredit.
- Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- Penambahan fasilitas kredit; dan atau
- Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

(Islami,2012)

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara melakukan seleksi terhadap pengusulan kredit, *monitoring* terhadap kredit yang disalurkan, cara penanganan kredit bermasalah, dan besarnya risiko kredit pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Besarnya risiko kredit dapat diukur dengan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap kinerja perbankan yang diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Assets* (ROA). Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang merupakan pengamatan terhadap obyek penelitian, yaitu PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data yang digunakan adalah wawancara dan laporan keuangan publikasi tahun periode triwulan I, II, III, dan IV 2014 sampai dengan 2015.

4.2. Analisis Data

Maka langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis risiko kredit pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

1. Seleksi Terhadap Pengusulan Kredit

- a. Identitas pemohon, Antara lain : nama pemohon, bentuk usaha, jenis usaha, susunan

pengurus, legalitas usaha, dan sebagainya. Informasi mengenai identitas ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang penanggung jawab utama atas pengelolaan perusahaan, lokasi perusahaan, serta keabsahan operasi perusahaan.

- b. Tujuan permohonan kredit, mencakup: jumlah kredit, obyek yang dibiayai, jangka waktu kredit dan alasan kebutuhan kredit. Informasi mengenai tujuan kredit ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa kredit tersebut benar-benar dipergunakan untuk membiayai usaha, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau spekulatif.
- c. Riwayat hubungan bisnis dengan bank, mencakup: saat mulai, bidang hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan bisnis dan jumlah total nilai hubungan bisnis.
- d. Analisis 5C kredit, mencakup analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi dan analisis agunan kredit.

1. Analisis watak (*character*) bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar dari pemohon,

mencakup perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit diajukan.

2. Analisis kemampuan (*capacity*)

dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan kredit dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola perusahaan), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil produksi), aspek personalia (kemampuan tenaga kerja dalam mendukung aktivitas perusahaan) dan aspek finansial (kemampuan menghasilkan laba).

3. Analisis modal (*capital*) bertujuan untuk

mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan laba usaha selama tiga periode sebelumnya.

4. Analisis agunan (*collateral*) bertujuan

untuk mengetahui besarnya nilai agunan

yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman lapis kedua bagi bank dalam setiap pemberian kredit apabila kredit yang diberikan menjadi bermasalah.

5. Analisis kondisi (*condition*) bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan dan pemasaran. Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari produk bersangkutan, barang substitusi yang beredar dipasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah. Pengukuran risiko kredit

Seleksi terhadap pengusulan kredit pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan prosedur penyeleksian dengan baik ditunjukkan NPL nya tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan Bank Indonesia (BI) Sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kredit.

2. *Monitoring* Terhadap Kredit Yang Disalurkan

Pengawasan kredit dapat dilakukan oleh pejabat kredit atau atasan dari pejabat tersebut dengan cara pengawasan ganda dan pengawasan melekat, maupun pemeriksaan oleh kantor inspeksi atau pihak ekstern (Bank Indonesia). Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan pengelolaan, penjagaan dan pengawasan kredit sebagai asset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul risiko-risiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern bank. PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan *monitoring* kredit dengan baik mulai sejak awal permohonan kredit sampai kredit dinyatakan lunas. Perkembangan usaha dan pembayaran angsuran debitur selalu *dimonitor*. Pelaksanaan *monitoring intern* untuk mengawasi kinerja para pegawai. Kegiatan kredit yang disalurkan PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah juga *dimonitor* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat mengetahui perkembangan kelancaran kredit dan kesehatan Bank.

3. Cara Penanganan Kredit Bermasalah

Langkah-langkah penanganan kredit bermasalah untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL) sehingga meminimalisir risiko kredit agar dapat meningkatkan tingkat kesehatan bank, sebagai berikut:

A.) Penyelamatan kredit bermasalah meliputi:

a. *rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Cara yang dilakukan bank dalam *rescheduling*, antara lain:

a.) Perpanjangan jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.

b.) jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulanan, perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulanan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.

c.) memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

b. *reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Cara yang dilakukan bank dalam *reconditioning*, antara lain:

a.) pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan dengan catatan minta Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan.

b.) Penundaan pembayaran bunga, pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu.

c. *restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan upaya mengubah struktur pembiayaan dikarenakan yang melakukan *restructuring* hanya bank besar

saja. Sedangkan BKK merupakan bagian dari BPR sehingga BKK tidak termasuk Bank Umum. Untuk saat ini BKK tidak pernah melakukan penambahan modal pada debitur.

B.) Penyelesaian kredit bermasalah meliputi: hapus buku, pengambilalihan agunan dan hapus tagih.

PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan penanganan kredit bermasalah mulai tahap awal proses kredit pada saat debitur memilih jenis kredit, dengan menetapkan agunan untuk jenis kredit umum dan asuransi kredit. Penanganan pembayaran angsuran dilakukan dengan analisis penagihan yaitu pegawai bank melakukan penanganan kredit bermasalah. Penanganan risiko kredit dari segi prosesnya sudah dilakukan dengan baik. Upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ialah *rescheduling* dan *reconditioning*. BKK beranggapan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan cara itu yang paling baik.

4. Besarnya Risiko Kredit

Hasil data keuangan pada bank PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan

Provinsi Jawa Tengah masih terkontrol dengan baik. Perhitungan Rasio Keuangan PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 dan tahun 2015 bisa dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.1. Perhitungan Rasio Keuangan pada tahun 2014-2015

NO	Rasio	2014 (%)	2015 (%)
1.	KPMM/CAR	20.5	18.75
2.	KAP	4.28	4.37
3.	NPL net	3.04	3
4.	ROA	5	4.25
5.	BOPO	72.25	74.75
6.	LDR	85.5	86.25
7.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	9.79	8.56

(sumber: laporan keuangan publikasi triwulan pada bank PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)

Informasi data-data keuangan dalam penelitian ini di dapatkan dari website resmi perusahaan dan website resmi BI dengan kurun waktu dari tahun 2014-2015. Setelah menghitung persentase rasio KPMM/CAR, KAP, NPL net, ROA, BOPO, LDR, dan *Cash Ratio*. KPMM/CAR tahun 2014 adalah 20.5% mengalami peningkatan sedangkan KPMM/CAR tahun 2015 adalah 18.75% mengalami penurunan. Jadi KPMM/CAR pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 1.75%. KAP tahun 2014 adalah 4.28% mengalami penurunan sedangkan KAP tahun

2015 adalah 4.37% mengalami peningkatan. Jadi KAP pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 0.09%.

NPL tahun 2014 adalah 3.04% mengalami peningkatan sedangkan NPL tahun 2015 adalah 3% mengalami penurunan. Jadi NPL pada PD. BPR BKK Purwodadi cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 0.04%. ROA tahun 2014 adalah 5% mengalami peningkatan sedangkan ROA tahun 2015 adalah 4.25% mengalami penurunan. Jadi ROA pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 0.75%. BOPO tahun 2014 adalah 72.25% mengalami penurunan sedangkan BOPO tahun 2015 adalah 74.75% mengalami peningkatan. Jadi BOPO pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 2.5%. LDR tahun 2014 adalah 85.5% mengalami penurunan sedangkan LDR tahun 2015 adalah 86.25% mengalami peningkatan. Jadi LDR pada PD. BPR BKK Purwodadi

Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 0.75%.

Cash Ratio tahun 2014 adalah 9.79% mengalami peningkatan sedangkan *cash ratio* tahun 2015 adalah 8.56% mengalami penurunan. Jadi *cash ratio* pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 1.23%. Berdasarkan Tabel 4.1. NPL net pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dengan rata-rata NPL net 3.04% pada tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 3%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui mengalami penurunan NPL net dari tahun 2014-2015 sehingga PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan Bank Indonesia (BI) sebesar 5%. Tingkat kolektibilitas kredit bermasalah pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dikategorikan Lancar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.) Seleksi Terhadap Pengusulan Kredit

PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan seleksi terhadap pengusulan kredit dengan baik dengan ditunjukkan NPL PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan Bank Indonesia (BI).

2.) *Monitoring* Terhadap Pengusulan Kredit

PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan *monitoring* kredit dengan baik mulai sejak awal permohonan kredit sampai kredit dinyatakan lunas. Perkembangan usaha dan pembayaran angsuran debitur selalu di *monitor*. Pelaksanaan *monitoring intern* untuk mengantisipasi sinyal-sinyal penyimpangan dari syarat-syarat kesepakatan bank dengan debitur.

3.) Cara Penanganan Kredit Bermasalah

PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penerapan penanganan kredit bermasalah dengan baik, mulai tahap awal proses kredit pada saat debitur memilih jenis kredit, dengan menetapkan agunan untuk jenis kredit umum. Petugas bank melakukan penanganan pembayaran angsuran kepada debitur Sehingga tidak muncul risiko kredit pada bank. Penanganan risiko kredit dari segi prosesnya sudah dilakukan dengan baik. Upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ialah *rescheduling* dan *reconditioning*. PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah beranggapan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan cara itu yang paling baik.

4.) Besarnya Risiko Kredit

Pengukuran risiko kredit pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan dengan baik sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI) yaitu *Non Performing Loan* (NPL). *Non Performing Loan* (NPL) digunakan untuk mengetahui kriteria dimana Bank Indonesia (BI) menetapkan jumlah NPL maksimal sebesar 5%. *Non Performing Loan* (NPL) pada PD. BPR BKK Purwodadi

Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.04% untuk tahun 2014 sedangkan tahun 2015 sebesar 3% tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan Bank Indonesia (BI) sebesar 5%. Tingkat kolektabilitas kredit bermasalah pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan Lancar.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2009), *Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 - Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, diporelah pada 02 juni 2016 di
http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_112509.aspx
- Bank Indonesia. (2011), *SE No.13/30/DPNP Tanggal 16 Desember 2011 Perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia*, diperoleh pada 22 Maret 2017 di
<http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/SE%20No.13-30-DPNP.aspx>
- Bank Indonesia. (2012), *Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*, diporelah pada 02 juni 2016 di
http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_141512.aspx
- Bank Indonesia. (2015), *Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional*, diperoleh pada 18 Januari 2017 di
http://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/pbi_171115.aspx
- Edratna, (2006), *Monitoring Selalu Diperlukan*, diperoleh pada 02 Juni 2016 di
<https://edratna.wordpress.com/2006/11/22/monitoring-selalu-diperlukan/>
- Faris, A. (2012), *Pengukuran Risiko*, diperoleh pada 07 Juni 2016 di
<https://agungfaris.wordpress.com/2012/10/23/pengukuran-resiko/>
- Greuning, H. V. dan Bratanovic, S. B., (2011), *Analisis Risik Perbankan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hanafi, M. M. (2012), *Manajemen Risiko*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Islami, B. W. U. F. (2008), *Analisis Manajemen Risiko Kredit pada PD BPR Sleman*, Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan), Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Ismail.(2010), *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kuncoro, M. dan Suhardjono. (2011), *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta.

- Lady, F. (2008), *Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit Oleh PT BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek*, Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan), Malang: Fakultas Ekonomi UMM.
- Mulyani, D. (2012), *Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Proses Pemberian Kredit Pemilik Rumah di PT. BII,Tbk.*, diperoleh pada 20 Maret 2017 di <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/616>
- Novianti. (2014), *Manajemen Risiko*, diperoleh pada 20 Maret 2017 di <http://myblognophy.blogspot.co.id/2014/04/manajemen-risiko.html>
- Paramitha, N., Suwendra, I., dan Yudiaatmaja, F.(2014), *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, vol. 2.
- Putra, S. , Topowijono, dan Sudjana, N. (2015), *Journal Administrasi Bisnis (JAB)*, 26(2).
- Siahaan, H. (2009), *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suyatno, T. , Chalik, H.A, Sukada, M. , Ananda, C. T. Y., dan Marala, D. T.(1995),*Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Taswan.(2010), *Manajemen Perbankan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Tengor, R, Murni, S, dan Moniharapan , S. (2015), *Analisis Manajemen Risiko Kredit sebagai Alat untuk Meminimalisir Risiko Kredit (Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja Malang)*, Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (EMBA)Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, 3(4),PP 345-356.
- Tjoekam,M. (1999), *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial Konsep, Teknik dan Kasus*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Qur'ani, G. A. (2013), *Analisis Pengaruh Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan Bank Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2011*, Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan), Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1. Pedoman pertanyaan

- 1) Mekanisme Seleksi
 - a. Bagaimana PD BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah melakukan seleksi terhadap nasabah atau calon debitur?
 - b. Apakah aspek 5C digunakan dalam menilai pemberian kredit oleh calon debitur?
- 2) Mekanisme Monitoring
 - a. Bagaimana sistem Bank melakukan pengawasan kredit di PD BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah setelah disetujuinya permohonan kredit?
 - b. Bagaimana upaya yang dilakukan apabila terjadi kredit macet?
- 3) Mekanisme Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah
 - a. Apa saja upaya atau tindakan yang dapat dilakukan Bank dalam penanganan kredit macet?
 - b. Bagaimana cara menentukan besar kecilnya pemberian kredit, hal apa yang perlu diperhatikan dalam pemberian ini?
 - c. Bagaimana ciri-ciri kredit bermasalah dan bagaimana melakukan pencegahan terhadap hal tersebut?

d. Faktor apa sajakah yang menyebabkan kredit macet dan kebijakan apa saja yang dilakukan Bank PD BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah untuk meminimalisir kredit macet?

e. Bagaimana penerapan manajemen risiko kredit yang efektif menurut Bank PD BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah?

4) Mekanisme Risiko Kredit

a. Apakah ada alat pengukuran risiko kredit pada PD BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah untuk debitur?

b. Bagaimana mekanisme pengukuran risiko terhadap debitur?

c. Apakah alat ukur risiko membantu pihak bank dalam memperoleh informasi?

LAPORAN INFORMASI LAIN
PD PD BPR BKK PURWODADI
Tanggal : 31 Maret 2014

(Ribuan Rp)

KETERANGAN	Maret 2014				
	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	78,027,460	0	0	0	78,027,460
2. Kredit yang diberikan					
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	1,737,243	0	17,233	0	1,754,476
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	307,160,476	4,424,876	2,974,633	10,332,733	324,892,718
3. Jumlah aset produktif	386,925,179	4,424,876	2,991,866	10,332,733	404,674,654
4. Rasio-Rasio (%)					
a. NPL net	0	0	0	0	3.21
b. KPMM	0	0	0	0	19.99
c. LDR	0	0	0	0	81.86
d. ROA	0	0	0	0	5.05
e. KAP	0	0	0	0	3.70
f. PPAP	0	0	0	0	103.08
g. BOPO	0	0	0	0	71.88
h. Cash Ratio	0	0	0	0	9.24

LAPORAN INFORMASI LAIN
PD PD BPR BKK PURWODADI
Tanggal : 30 Juni 2014

(Ribuan Rp)

KETERANGAN	Juni 2014				
	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	36,521,495	0	0	0	36,521,495
2. Kredit yang diberikan					
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	1,389,798	30,000	0	0	1,419,798
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	326,970,300	3,477,560	3,666,115	11,597,145	345,711,120
3. Jumlah aset produktif	364,881,593	3,507,560	3,666,115	11,597,145	383,652,413
4. Rasio-Rasio (%)					
a. NPL net	0	0	0	0	3.04
b. KPMM	0	0	0	0	20.03
c. LDR	0	0	0	0	90.28
d. ROA	0	0	0	0	4.87
e. KAP	0	0	0	0	4.19
f. PPAP	0	0	0	0	101.25
g. BOPO	0	0	0	0	72.13
h. Cash Ratio	0	0	0	0	5.60

LAPORAN INFORMASI LAIN
PD PD BPR BKK PURWODADI
Tanggal : 30 September 2014

(Ribuan Rp)

KETERANGAN	September 2014				
	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	69,995,706	0	0	0	69,995,706
2. Kredit yang diberikan					
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	1,125,534	0	0	0	1,125,534
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	327,671,844	3,940,774	3,281,429	12,827,531	347,721,578
3. Jumlah aset produktif	398,793,084	3,940,774	3,281,429	12,827,531	418,842,818
4. Rasio-Rasio (%)					
a. NPL net	0	0	0	0	3.15
b. KPMM	0	0	0	0	21.22
c. LDR	0	0	0	0	83.91
d. ROA	0	0	0	0	5.11
e. KAP	0	0	0	0	4.16
f. PPAP	0	0	0	0	102.19
g. BOPO	0	0	0	0	71.69
h. Cash Ratio	0	0	0	0	8.28

LAPORAN INFORMASI LAIN
PD PD BPR BKK PURWODADI
Tanggal : 31 Desember 2014

(Ribuan Rp)

KETERANGAN	Desember 2014				
	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	68,505,245	0	0	0	68,505,245
2. Kredit yang diberikan					
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	1,382,346	0	0	0	1,382,346
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	336,585,990	3,263,032	3,357,644	14,649,811	357,856,477
3. Jumlah aset produktif	406,473,581	3,263,032	3,357,644	14,649,811	427,744,068
4. Rasio-Rasio (%)					
a. NPL net	0	0	0	0	2.77
b. KPMM	0	0	0	0	20.74
c. LDR	0	0	0	0	86.23
d. ROA	0	0	0	0	5.00
e. KAP	0	0	0	0	5.06
f. PPAP	0	0	0	0	100.00
g. BOPO	0	0	0	0	72.90
h. Cash Ratio	0	0	0	0	16.04

LAPORAN INFORMASI LAIN
PD PD BPR BKK PURWODADI
Tanggal : 31 Maret 2015

(Ribuan Rp)

KETERANGAN	Maret 2015				
	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	98,841,789	0	0	0	98,841,789
2. Kredit yang diberikan					
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	1,157,164	0	0	0	1,157,164
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	351,546,005	3,979,970	2,925,428	15,141,361	373,592,764
3. Jumlah aset produktif	451,544,958	3,979,970	2,925,428	15,141,361	473,591,717
4. Rasio-Rasio (%)					
a. NPL net	0	0	0	0	2.87
b. KPMM	0	0	0	0	19.18
c. LDR	0	0	0	0	80.76
d. ROA	0	0	0	0	4.56
e. KAP	0	0	0	0	4.15
f. PPAP	0	0	0	0	102.18
g. BOPO	0	0	0	0	72.81
h. Cash Ratio	0	0	0	0	8.33

LAPORAN INFORMASI LAIN
PD PD BPR BKK PURWODADI
Tanggal : 30 Juni 2015

(Ribuan Rp)

KETERANGAN	Juni 2015				
	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	43,752,587	0	0	0	43,752,587
2. Kredit yang diberikan					
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	1,153,272	0	0	0	1,153,272
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	378,827,641	4,409,691	3,093,698	15,991,978	402,323,008
3. Jumlah aset produktif	423,733,500	4,409,691	3,093,698	15,991,978	447,228,867
4. Rasio-Rasio (%)					
a. NPL net	0	0	0	0	2.90
b. KPMM	0	0	0	0	18.89
c. LDR	0	0	0	0	92.14
d. ROA	0	0	0	0	4.23
e. KAP	0	0	0	0	4.59
f. PPAP	0	0	0	0	100.54
g. BOPO	0	0	0	0	74.44
h. Cash Ratio	0	0	0	0	7.98

LAPORAN INFORMASI LAIN
PD PD BPR BKK PURWODADI
Tanggal : 30 September 2015

(Ribuan Rp)

KETERANGAN	September 2015				
	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	58,395,887	0	0	0	58,395,887
2. Kredit yang diberikan					
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	1,180,100	0	0	0	1,180,100
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	384,750,430	4,878,092	4,477,079	16,397,634	410,503,235
3. Jumlah aset produktif	444,326,417	4,878,092	4,477,079	16,397,634	470,079,222
4. Rasio-Rasio (%)					
a. NPL net	0	0	0	0	3.15
b. KPMM	0	0	0	0	18.71
c. LDR	0	0	0	0	87.87
d. ROA	0	0	0	0	4.07
e. KAP	0	0	0	0	4.72
f. PPAP	0	0	0	0	100.67
g. BOPO	0	0	0	0	76.70
h. Cash Ratio	0	0	0	0	7.94

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PD. BPR BKK Purwodadi
 JL. R. SOEPRAPTO NO. 128 B PURWODADI
 Periode: Desember-2015
Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	84,685,041				84,685,040
2. Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-
a. Kepada BPR					
b. Kepada Bank Umum					
c. Kepada non bank - pihak terkait	1,115,431				1,115,431
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	400,511,513	3,737,538	3,717,963	13,604,488	421,571,500
3. Jumlah aset produktif	486,311,985	3,737,538	3,717,963	13,604,488	507,372,000
4. Rasio-Rasio (%)	-	-	-	-	-
a. NPL net					3
b. KPMM					18
c. LDR					84
d. ROA					4
e. KAP					4
f. PPAP					100
g. BOPO					75
h. Cash Ratio					10

Rasio – Rasio Keuangan dan Data Keuangan PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. KPMM/CAR

KPMM/CAR 2014-2015		
bulan	KPMM/CAR 2014	KPMM/CAR 2015
Triwulan I	20	19
Triwulan II	20	19
Triwulan III	21	19
Triwulan IV	21	18
Jumlah	82	75
average	20.5	18.75

2. KAP

KAP 2014-2015		
bulan	KAP 2014	KAP 2015
Triwulan I	3.7	4.15
Triwulan II	4.19	4.59
Triwulan III	4.16	4.72
Triwulan IV	5.06	4
Jumlah	17.11	17.46
average	4.28	4.37

3. NPL

NPL net 2014-2015		
bulan	NPL net 2014	NPL net 2015
Triwulan I	3.21	3
Triwulan II	3.04	3
Triwulan III	3.15	3
Triwulan IV	2.77	3
Jumlah	12.17	12
average	3.0425	3

4. ROA

ROA 2014-2015		
bulan	ROA 2014	ROA 2015
Triwulan I	5	5
Triwulan II	5	4
Triwulan III	5	4
Triwulan IV	5	4
Jumlah	20	17
average	5	4.25

5. BOPO

BOPO 2014-2015		
bulan	BOPO 2014	BOPO 2015
Triwulan I	72	73
Triwulan II	72	74
Triwulan III	72	77
Triwulan IV	73	75
Jumlah	289	299
average	72.25	74.75

6. LDR

LDR 2014-2015		
bulan	LDR 2014	LDR 2015
Triwulan I	82	81
Triwulan II	90	92
Triwulan III	84	88
Triwulan IV	86	84
Jumlah	342	345
average	85.5	86.25

7. *Cash Ratio*

CR 2014-2015		
bulan	CR 2014	CR 2015
Triwulan I	9.24	8.33
Triwulan II	5.6	7.98
Triwulan III	8.28	7.94
Triwulan IV	16.04	10
Jumlah	39.16	34.25
average	9.79	8.56